

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies: Revitalisasi TIM Tak Cari Keuntungan

Gambir, Warta Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Pemprov DKI Jakarta tak mengambil keuntungan dari proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Anies menyebut, penataan TIM dilakukan agar seniman dan budayawan Indonesia khususnya Jakarta dapat memiliki pusat kesenian terbaik di dunia.

"Kami memang berencana dan sedang dilaksanakan revitalisasi TIM untuk bisa menjadi tempat panggung, seni budaya bagi seniman dan budayawan Indonesia di gelanggang dunia," ujar Anies saat rapat dengar pendapat dengan Komisi

X DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/2).

Anies meminta masyarakat tak khawatir mengenai proyek revitalisasi tersebut meski dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Kata dia, pembangunan yang dilakukan Jakpro merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Dia mencontohkan, seperti halnya pemerintah pusat yang memiliki kementerian, lembaga/badan serta BUMN dalam melayani masyarakat. Sementara untuk tingkat pemerintah daerah, memiliki dinas, badan serta BUMD.

"Kami di DKI punya perusahaan-perusahaan layanan masyarakat yang tidak prioritas cari keuntungan. Misalnya PT Transjakarta, PT MRT dan PT LRT, memang mereka cari untung? Kan tidak," katanya.

"Bentuk perusahaan memang PT, tapi kalau PT yang dimiliki oleh negara, mereka menjalankan pelayanan publik dengan menggunakan mekanisme sebuah badan usaha tapi orientasinya tetap pada pelayanan publik," tambah Anies. Menurut dia, berbeda bila PT yang dimiliki oleh non-pemerintah. Perusahaan tersebut cenderung berorientasi

pada keuntungan dalam setiap bisnisnya.

Dalam proyek ini, Anies lalu menugaskan Jakpro untuk menangani persoalan seni dan budaya dengan penuh kreatifitas, inovasi dan perubahan. Harapannya BUMD tersebut lebih fleksibel namun tetap akuntabel dalam melayani masyarakat. Apalagi BUMD akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pekerjaannya dalam melayani masyarakat. Kata dia, pemerintah selalu bekerja menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ketat. (faf)